

LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Output NVIVO 12.0 Skema, Model, Tema

Tampilan *Software* NVIVO 12.0

The screenshot displays the NVIVO 12.0 interface. On the left, a navigation pane shows a tree structure of nodes under 'Tahap Inisiasi'. The main area shows a 'Classification Sheet' with columns for Name, F (Frequency), R (Ratio), Created date, and Source. The right pane shows a 'Reference' snippet with text about budget allocation and pandemic impact.

Name	F	R	Created...	Created...
Tahap Inisiasi	2	17	17/03/22	NILAMCP
mengeluarkan aturan	2	5	17/03/22	NILAMCP
pengalihan dana	2	11	17/03/22	NILAMCP
Rencana Antisipasi	1	2	17/03/22	NILAMCP
Tahap proses	2	11	17/03/22	NILAMCP
Tahap Penyusunan Anggaran	1	3	28/03/22	NILAMCP
Penyusunan KUA PPAS	1	1	28/03/22	NILAMCP
Penyusunan RKA SKPD	1	1	28/03/22	NILAMCP
Penyiapan RANPERDA APBD	1	1	28/03/22	NILAMCP
Evaluasi	1	1	28/03/22	NILAMCP
Tahap Perubahan Anggaran	0	0	28/03/22	NILAMCP
penyampaian rancangan perubahan KUA dan PPAS	1	1	27/03/22	NILAMCP
pembahasan perubahan rancangan KUA dan PPAS	1	1	27/03/22	NILAMCP
Penerbitan Surat Edaran	1	1	27/03/22	NILAMCP
penyampaian rancangan perdda tentang perubahan APBD	1	1	27/03/22	NILAMCP
pengambilan persetujuan	1	1	27/03/22	NILAMCP
penyampaian rancangan perda ke mentri atau gubernur	1	1	27/03/22	NILAMCP
penerbitan hasil evaluasi	1	1	27/03/22	NILAMCP
menyempurnakan hasil evaluasi	1	1	27/03/22	NILAMCP
penyampaian keputusan	1	1	27/03/22	NILAMCP
Tahap Implementasi	1	2	17/03/22	NILAMCP
SIPD	1	2	24/03/22	NILAMCP

Reference 1: 4.56% cover
kondisi seperti sekarang ini memang perlu banyak hal yang harus di perhatikan mbak ya, ya kan tau sendiri to kalau sekarang fokusnya pasti sudah ke kesehata dan sosial masyarakat, karna kan kayak tenaga medis pasti butuh uang ya mbak butuh dana supaya mereka bisa bergerak untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, nah dana ini kalau dari pemerintah ya ndak sembarangan kelua kan makanya kita perlu anggarkan supaya kasarnya uangnya tu cukup ndak kelebihan ndak kekurangan karna emang butuhnyanya banyak ya pandemi ini. mal dari itu ya kami pemerintah ini harus bekerja keras ni mbak karna ini kejadiann langka dan bahkan gak pernah terjadi.

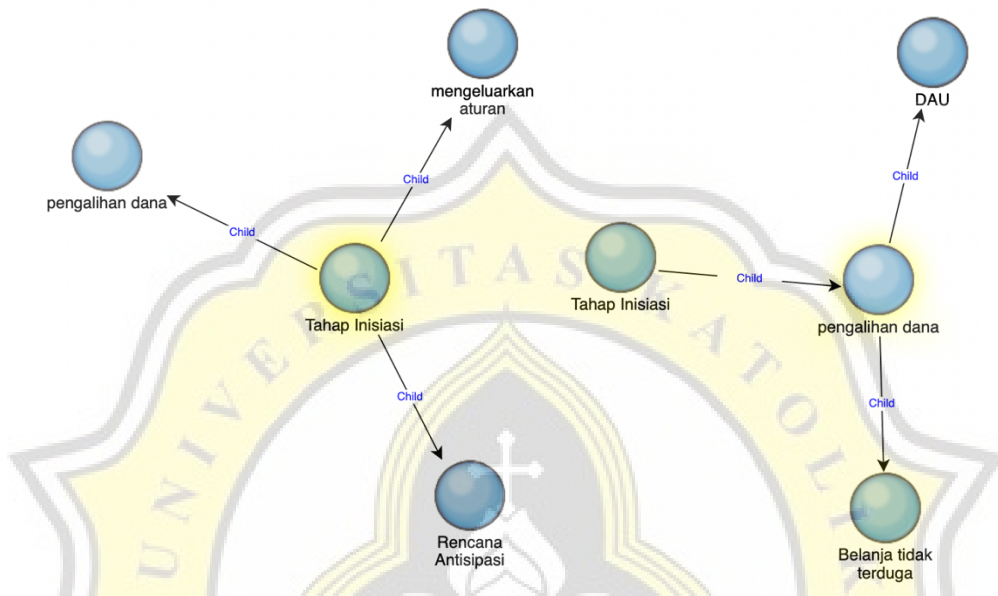
Reference 2: 3.06% cover
Jadi gini mbak, penganggaran covid itu semua di atur lewat permendagri mulai sejak 2020 saat emergency, la terus setelah itu dilanjutkan dengan peraturan permendagri lain, nah terutama untuk menyempurnakan aturan itu khususnya penggunaan pengalihan dana buat pandemi ini karena pandemi ini itu ada ee.. APBD itu sudah berjalan mungkin sudah setengah jalan kan kita tau to kemarin covid di bulan bulan maret atau April ya mbak.

Reference 3: 3.85% cover
Terus pemerintah tu selanjutnya harus segera melakukan pengalihan belanja un masalah covid. Ee.. pengalihan yang ee.. dilakukan itu difokuskan untuk 3 hal y ee.. pertama ada pengangan kesehatan, terus JPS (jaring pengaman social) dan satu lagi itu eeee... dampak ekonomi nag itu semua juga ada mbak di ature permendagri kayaknya kalau ndak salah ada di pengutamaan anggaran nanti bi dibaca baca lagi ya mbak, itu di ee.. apa itu.. di.. internet ada kok banyak seka sekalian untuk sumber mbak nilam kalau mbuat skripsinya nanti ya.

Reference 4: 4.60% cover
Nah terus tak lanjutin ya mbak. karena adanya pandemic ini to nah pemerintah yang pertama harus dilakukan itu adalah melakukan Pergeseran anggaran, dan

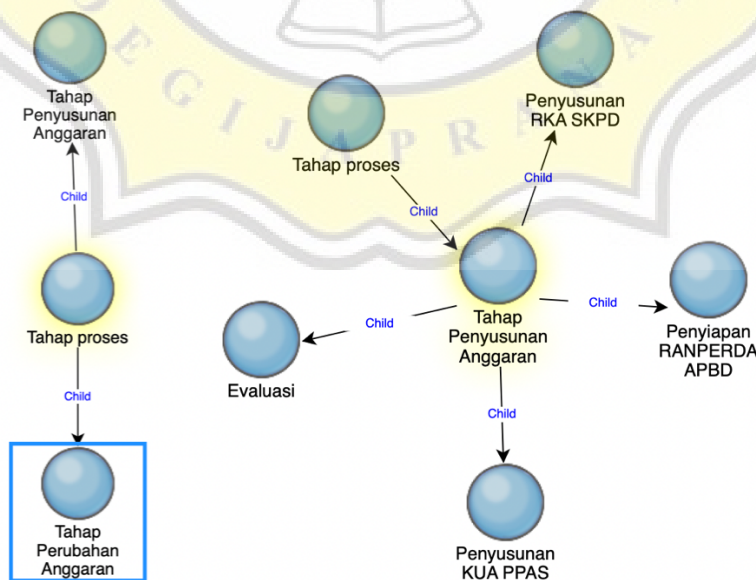
Lampiran 2
Tahap Inisiasi

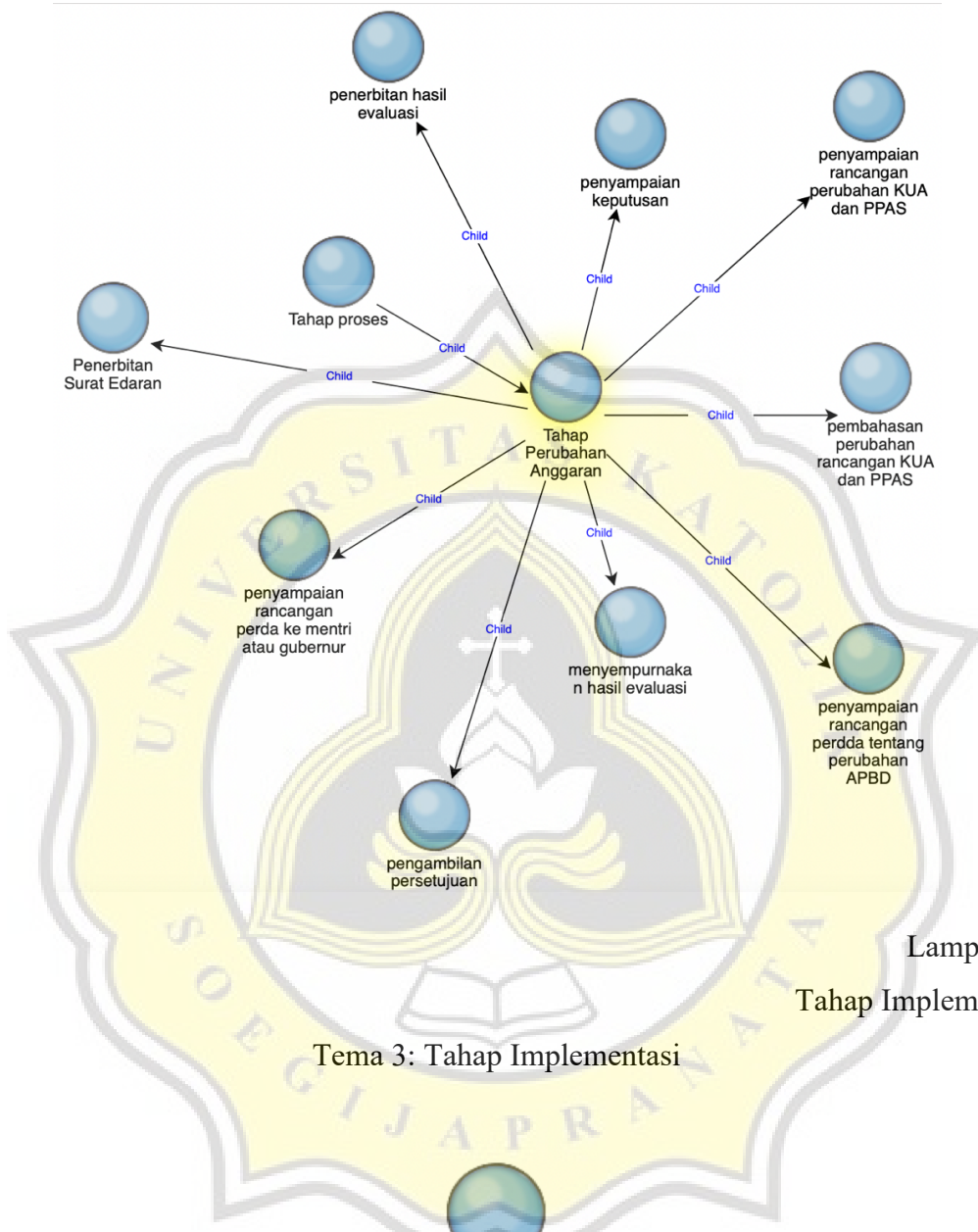
Tema 1: Tahap Inisiasi



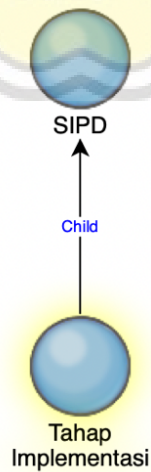
Lampiran 3
Tahap Proses

Tema 2: Tahap Proses





Tema 3: Tahap Implementasi



HASIL OUTPUT NVIVO 12

Fase Inisiasi, Proses, dan Implementasi

1. Tema 1 = Tahap Inisiasi
- Subtema 1 = Mengeluarkan Aturan

[Files\hasil abstraksi wawancara\HASIL WAWANCARA INTERVIEWEE 1](#)

1 reference coded, 5.30% coverage

Reference 1: 5.30% coverage

jadi di tahun 2021 itu juga sudah ada kebijakan, kaya yang saya bilang tadi ya pemerintah udah menyiapkan rencana untuk mengawali tahun 2021 ini dan itu pemerintah pusat menginstruksikan agar pemerintah daerah menyiapkan anggaran sekitar ee 8% kayaknya, oh iya 8% itu di pertengahan APBD berjalan 2 bulan juga saat berjalan pemerintah daerah ini harus melaksanakan refocusing anggaran sebanyak 8% dari dana transfer umum (DAU). Jadi kit aini sediakan sebesar 72 M kalau ndak salah untuk ditempatkan di SKPD yang memang menangani covid ataupun pencegahan penularan covid, khususnya untuk sosialnya ya mbak seperti posko satgas covid di tingkat bawah itu juga ada anggarannya, dan dinas besar pun juga pasti ada seperti dinkes, rs, satpol pp dan lain lain.

Reference 1 - 3.06% Coverage

Jadi gini mbak, penganggaran covid itu semua di atur lewat permendagri mulai sejak 2020 saat emergency, la terus setelah itu dilanjutkan dengan peraturan permendagri lain, nah terutama untuk menyempurnakan aturan itu khususnya penggunaan pengalihan dana buat pandemi ini karena pandemi ini itu ada ee.. saat APBD itu sudah berjalan mungkin sudah setengah jalan kan kita tau to kemarin itu covid di bulan bulan maret atau April ya mbak.

Reference 2 - 0.98% Coverage

Nah in intinya pemerintah dalam melakukan anggaran dalam masa covid ini semua kegiatannya sudah diatur mbak, di apa tu tadi di permendagri.

Reference 3 - 1.50% Coverage

Anggaran itu sesuai dengan aturan semua mbak, bahkan ini tu saat pelaksanaannya semua itu juga ada aturannya, semua berdasarkan aturan pokoknya, sudah komplit. Jadi setiap ada kebijakan PPKM ada inmendagrinya.

Reference 4 - 2.57% Coverage

o yaa, penyesuaian anggaran itu mbak, melewati mekanisme pergeseran anggaran dikarenakan APBD sudah berjalan ya, jadi ini harus di geser, nah itu bupati punya kewenangan untuk melakukan pergeseran. Ini ada di permendagri 77 tentang pengelolaan keuangan daerah, ambil aja di pergeseran anggaran atau ada di... belanja tidak terduga, karena tentang covid ada disitu.

Reference 1 - 12.79% Coverage

iya kalau misalnya tentang sikap pemerintah ya, pemerintah itu ya banyak punya kebijakan tentang dengan Pandemi, lockdown PPKM terus PSBB yang sudah kita jalani kemarin atau saat ini itu juga ee... salah satu bentuk kebijakan dari pemerintah Indonesia ya, tapi kalau misal mbak Nilam tanya nya tentang bagaimana kebijakan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah itu ada beberapa kebijakan yang sebenarnya ini adalah kebijakan ee...secara general ya secara umum yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk seluruh pemerintah daerah. Terus di dalam pemerintahan itu kan APBD ini penting ya mbak, terutama buat di pengendalian keuangan ee...sebelum maupun sesudah Pandemi ya. Ada beberapa kebijakan yang sudah dikeluarkan yang pertama itu ada pemerintah mengenai merintahkan kepada ee...seluruh Menteri gubernur dan Bupati atau walikota untuk memangkas pengeluaran yang sekiranya itu bukan non prioritas. Semua kebijakan ini sebenarnya ada di inpres yang dikeluarkan, kalau nggak salah inpres 4 tahun 2020, nanti bisa diliat sendiri ya, disitu ada beberapa kebijakan ya salah satunya tadi ya pemangkasan pengeluaran non prioritas. Jadi pemangkasan itu ya di alihkan untuk kegiatan kegiatan yang ada hubungannya sama covid ya mbak. kalau nggak salah ada 5 atau 6 kebijakan yang dikeluarkan nanti boleh dibaca sendiri.

- 2. Tema 1 = Tahap Inisiasi
- Subtema 2 = Pengalihan Dana
- Kategori 1 = Belanja Tidak Terduga

[Files\hasil abstraksi wawancara\HASIL WAWANCARA INTERVIEWEE 1](#)

1 reference coded, 5.30% coverage

Reference 1: 5.30% coverage

jadi di tahun 2021 itu juga sudah ada kebijakan, kaya yang saya bilang tadi ya pemerintah udah menyiapkan rencana untuk mengawali tahun 2021 ini dan itu pemerintah pusat menginstruksikan agar pemerintah daerah menyiapkan anggaran sekitar ee 8% kayaknya, oh iya 8% itu di pertengahan APBD berjalan 2 bulan juga saat berjalan pemerintah daerah ini harus melaksanakan refocusing anggaran sebanyak 8% dari dana transfer umum (DAU). Jadi kit aini sediakan sebesar 72 M kalau ndak salah untuk ditempatkan di SKPD yang memang menangani covid ataupun pencegahan penularan covid, khususnya untuk sosialnya ya mbak seperti posko satgas covid di tingkat bawah itu juga

ada anggarannya, dan dinas besar pun juga pasti ada seperti dinkes, rs, satpol pp dan lain lain.

Reference 1 - 2.37% Coverage

jadi disitu akan dijelaskan bahwa melakukan realokasi ini dengan cara mengoptimalkan belanja tidak terduga namanya mbak. Nanti disitu ada penjelasannya, soalnya saya juga tidak begitu hafal, nanti bisa dicek sendiri ya mbak. Belanja tidak terduga ini itu dalam rangka buat mengantisipasi, menangani dampak penularan COVID-19 mbak.

Reference 2 - 8.79% Coverage

Nah pergeseran yang sudah tak bilang tadi itu to mbak, itu yang digeser itu Namanya Belanja tidak terduga tadi tu ya. Disitu ada ee.. pergeseran untuk belanja SKPD yang khusus menangani covid kayak rumah sakit, terus eee.. dinkes, terus apa tu yang di kelurahan kelurahan apa des aitu lho mbak, kok saya lupa Namanya.. oh kalau ndak salah satgas covid, terus jug ada dinas social yang untuk menangani social dan lingkungan dan lain lain yak arna SKPD kan banyak ya. Nah Pemerintah Daerah ini tu harus mengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu mbak, nah ini ada beberapa misalnya kayak belanja pegawai, belanja barang/jasa, belanja modal, dll. Terus BTT ini juga untuk melakukan penganggarannya juga gak sembarangan mbak. ada step step nya. ni tak jelasin secara umum aja ya. jadi yang pertama itu kepala perangkat daerah yang secara fungsional ada hubungannya sama antisipasi dan penanganan dampak COVID-19, harus mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) ke PPKD yang jadi bendahara (BUD) la terus kalau udah di acc, BTT di cairkan. Pencairan dana ini ya harus sesuai sama sistem dan prosedurnya ya. terus nanti pencairan tadi tu mbak di catet di buku kas umum sama Bendahara Pengeluaran perangkat daerah yang mengajukan RKB tadi.

Reference 3 - 4.03% Coverage

Kemudian juga untuk yang 2022 itu ada kebijakan pemerintah yaitu apa itu ee.. untuk mengalokasikan dananya sebesar 5% di atas belanja tidak terduga tahun lalu. Jadi kita ada anggaran sekitar 32 M untuk penyediaan ee..pengelolaan covid dan pastinya dampaknya ya. Jadi yang bisa di cover anggaran itu bukan hanya kasus covidnya aja ya mbak, tetapi juga bisa ke sosialnya seperti pemerintah kan kasih bansos, hibah, dan lain lain ya, tapi kalau saat ini sih belum ada. Seperti untuk pelaku usaha yang banyak terkena dampak dari covid itu mungkin besok akan dianggarkan sendiri.

- 3. Tema 1 = Tahap Inisiasi
- Subtema 2 = Pengalihan Dana
- Kategori 2 = DAU

[Files\hasil abstraksi wawancara\HASIL WAWANCARA INTERVIEWEE 1](#)

1 reference coded, 5.30% coverage

Reference 1: 5.30% coverage

jadi di tahun 2021 itu juga sudah ada kebijakan, kaya yang saya bilang tadi ya pemerintah udah menyiapkan rencana untuk mengawali tahun 2021 ini dan itu pemerintah pusat menginstruksikan agar pemerintah daerah menyiapkan anggaran sekitar ee 8% kayaknya, oh iya 8% itu di pertengahan APBD berjalan 2 bulan juga saat berjalan pemerintah daerah ini harus melaksanakan refocusing anggaran sebanyak 8% dari dana transfer umum (DAU). Jadi kit aini sediakan sebesar 72 M kalau ndak salah untuk ditempatkan di SKPD yang memang menangani covid ataupun pencegahan penularan covid, khususnya untuk sosialnya ya mbak seperti posko satgas covid di tingkat bawah itu juga ada anggarannya, dan dinas besar pun juga pasti ada seperti dinkes, rs, satpol pp dan lain lain.

4. Tema 1 = Tahap Inisiasi
Subtema 3 = Rencana Antisipasi

[Files\hasil abstraksi wawancara\HASIL WAWANCARA INTERVIEWEE 1](#)

2 references coded, 9.35% coverage

Reference 1: 5.32% coverage

nah bener itu mbak, untuk kasus omicron saat ini ya pemerintah itu ya sudah menyiapkan rencana untuk mengantisipasi. Di dinas social dan kesehatan pun juga sudah menganggarkan tapi ya itu porsinya tidak full setahun kebutuhan tapi memang sudah tersedia kalau tiba tiba ada terjadi lonjakan kasus lagi to kaya kemaren kalau ndak diantisipasi nanti ya repot. La terus kalau nanti kalau misalnya, misalnya aja ya semoga tidak, ada kejadian kurang dananya ya semoga tidak, itu ada namanya penyediaan di belanja tidak terduga nanti bisa dialihkan kesitu untuk pendanaan sepanjang untuk penanganan dan pencegahan covid 19. Ya sebenarnya masih sama ya seperti tadi tapi mungkin kalau sekarang sudah lebih siap dan tertata aja sih untuk menyesuaikan anggarannya.

Reference 2: 4.03% coverage

Kemudian juga untuk yang 2022 itu ada kebijakan pemerintah yaitu apa itu eee.. untuk mengalokasikan dananya sebesar 5% di atas belanja tidak terduga tahun lalu. Jadi kita ada anggaran sekitar 32 M untuk penyediaan ee..pengelolaan covid dan pastinya dampaknya ya. Jadi yang bisa di cover anggaran itu bukan hanya kasus covidnya aja ya mbak, tetapi juga bisa ke

sosialnya seperti pemerintah kan kasih bansos, hibah, dan lain lain ya, tapi kalau saat ini sih belum ada. Seperti untuk pelaku usaha yang banyak terkena dampak dari covid itu mungkin besok akan dianggarkan sendiri.

- 5. Tema 2 = Tahap Proses
- Subtema 1 = Penyusunan Anggaran
- Kategori 1 = Penyusunan KUA PPAS

[Files\hasil abstraksi wawancara\HASIL WAWANCARA INTERVIEWEE 2](#)

1 reference coded, 6.40% coverage

Reference 1: 6.40% coverage

kalau pake sistem ya secara umum sama kayak proses anggaran yang dulu ya mbak, cuma sekarang pake sistem aja tapi di sistem itu sebenarnya sama mbak. kalau membuat anggaran itu ya pertama ya ada penyusunan RKPD di BAPEDA, nah terus setelah itu melakukan transfer ke penyusunan KUA/PPAS melalui aliran dari RKPD, ini pakai sistem mbak. Nah KUA ini disusun berdasarkan RKPD dengan mengacu pada penyusunan APBD yang dikeluarkan permendagri. penyusunan KUA/PPS dilakukan oleh TAPD atau tim anggaran pemerintah daerah. ini tim yang dibentuk dalam rangka penyusunan RAPBD yang terdiri dari Bappeda, PPKD, dan pejabat lain yang ditunjuk. TAPD ini diketuai oleh SEKDA.

- 6. Tema 2 = Tahap Proses
- Subtema 1 = Penyusunan Anggaran
- Kategori 2 = Penyusunan RKA SKPD

[Files\hasil abstraksi wawancara\HASIL WAWANCARA INTERVIEWEE 2](#)

1 reference coded, 9.12% coverage

Reference 1: 9.12% coverage

Penyusunan RKPD ini alur kerjanya gini mbak, yang pertama kan mengumpulkan bahan lalu di bahas dan disampaikan ke bupati. terus setelah itu PPAS dibahas di DPRD sebelum dikirim ke bupati, nah pembahasan itu lewat rapat paripurna namanya. setelah dibahas kan dikirim ya mbak, terus nanti ada yang namanya nota kesepakatan dari bupati dan itu sudah di tanda tangani sama pak bupatinya dan juga DPRD nya. nota kesepakatan itu apa sih sebenarnya, jadi nota kesepakatan itu bisa juga kita bilang sebagai dasar penyusunan anggaran. kalau dasar penyusunannya sudah ada lalu kita bisa

menyusun RKA namanya, rencana kerja anggaran. RKA ini kita kumpulkan lewat SKPD yang berisikan detail anggaran yang mereka ajukan. untuk penyusunan di SKPD ya nanti awalnya kepala SKPD menyusun RKA SKPD berdasar KUA/PPAS. RKA ini di susun berdasar adanya kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu, dan penganggaran berdasarkan kinerja.

- 7. Tema 2 = Tahap Proses
- Subtema 1 = Penyusunan Anggaran
- Kategori 3 = Penyiapan RANPERDA APBD

[Files\hasil abstraksi wawancara\HASIL WAWANCARA INTERVIEWEE 2](#)

1 reference coded, 5.06% coverage

Reference 1: 5.06% coverage

setelah RKA SKPD dah disusun, kepala SKPD menyampaikan ke kepala PPKD sebagai bahan penyusunan Rancangan perda tentang APBD sesuai dengan jadwal ya yang ada di pedoman penyusunan. RKA SKPD lalu disampaikan ke TAPD melalui PPKD supaya bisa diverifikasi. nah kalau ada yang ndak sesuai nanti kepala SKPD melakukan penyempurnaan. dan itu yang akan menjadi RAPBD. Terus kalau sudah ada ee RAPBD ini disampaikan ke DPRD lewat paripurna lagi. setelah itu pasti ada yang namanya rapat badan anggaran kita biasa sebut banggar mbak.

- 8. Tema 2 = Tahap Proses
- Subtema 1 = Penyusunan Anggaran
- Kategori 4 = Evaluasi

[Files\hasil abstraksi wawancara\HASIL WAWANCARA INTERVIEWEE 2](#)

1 reference coded, 3.08% coverage

Reference 1: 3.08% coverage

kalau udah di bahas lalu nanti dikirim ke provinsi buat di evaluasi, kalau sudah di evaluasi provinsi nanti di evaluasi lagi saat banggar oleh TAPD. setelah itu nanti dikirim lagi ke provoinisi untuk dikonfirmasi dan minta nomor registrasi Perda APBD. kalau sudah dapet baru bisa disahkan yang paling lambat 31 desember.

- 9. Tema 2 = Tahap Proses

- Subtema 2 = Perubahan Anggaran
Kategori 1 = Penyampaian Rancangan KUA PPAS

[Files\hasil abstraksi wawancara\HASIL WAWANCARA INTERVIEWEE 1](#)

1 reference coded, 0.84% coverage

Reference 1: 0.84% coverage

Yang pertama itu di.. lakukan penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS itu sama bupati ke DPRD dulu mbak.

10. Tema 2 = Tahap Proses
Subtema 2 = Perubahan Anggaran
Kategori 2 = Pembahasan Perubahan Rancangan KUA PPAS

[Files\hasil abstraksi wawancara\HASIL WAWANCARA INTERVIEWEE 1](#)

1 reference coded, 1.17% coverage

Reference 1: 1.17% coverage

terus setelah itu ya dilakukan apa Namanya pembahasan terus ada muncul kesepakatan antara Bupati dan DPRD tentang Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS tadi ya.

11. Tema 2 = Tahap Proses
Subtema 2 = Perubahan Anggaran
Kategori 3 = Penerbitan Surat Edaran

[Files\hasil abstraksi wawancara\HASIL WAWANCARA INTERVIEWEE 1](#)

1 reference coded, 1.87% coverage

Reference 1: 1.87% coverage

Nah setelah itu mbak dikeluarkan Namanya Surat Edaran Bupati itu isinya Pedoman Penyusunan RKA-SKPD, RKA-PPKD dan Perubahan DPA-SKPD/PPKD dan Penyusunan Rancangan Perda Tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD

12. Tema 2 = Tahap Proses
Subtema 2 = Perubahan Anggaran
Kategori 4 = Penyampaian Rancangan Perda Tentang Perubahan APBD

[Files\hasil abstraksi wawancara\HASIL WAWANCARA INTERVIEWEE 1](#)

1 reference coded, 0.77% coverage

Reference 1: 0.77% coverage

Terus kalau sudah mbak nanti Rancangan Perda tadi yang tentang Perubahan APBD disampaikan sama Bupati ke DPRD

13. Tema 2 = Tahap Proses
Subtema 2 = Perubahan Anggaran
Kategori 5 = Pengambilan Persetujuan

[Files\hasil abstraksi wawancara\HASIL WAWANCARA INTERVIEWEE 1](#)

1 reference coded, 0.94% coverage

Reference 1: 0.94% coverage

Kalau udah disampaikan terus kan di setuju atau tidak nah kalau disetujui nanti ada pengambilan persetujuan bersama DPRD dan Bupati

14. Tema 2 = Tahap Proses
Subtema 2 = Perubahan Anggaran
Kategori 6 = Penyampaian RANPERDA ke Menteri/Gubernur

[Files\hasil abstraksi wawancara\HASIL WAWANCARA INTERVIEWEE 1](#)

1 reference coded, 0.92% coverage

Reference 1: 0.92% coverage

Terus nanti yang tadi disampaikan ke Menteri Dalam Negeri/Gubernur buat di evaluasi. Kalau udah ya nanti Hasil Evaluasi nya keluar

15. Tema 2 = Tahap Proses
Subtema 2 = Perubahan Anggaran
Kategori 7 = Penerbitan Hasil Evaluasi

[Files\\hasil abstraksi wawancara\\HASIL WAWANCARA INTERVIEWEE 1](#)

1 reference coded, 0.92% coverage

Reference 1: 0.92% coverage

Terus nanti yang tadi disampaikan ke Menteri Dalam Negeri/Gubernur buat di evaluasi. Kalau udah ya nanti Hasil Evaluasi nya keluar

16. Tema 2 = Tahap Proses
Subtema 2 = Perubahan Anggaran
Kategori 8 = Menyempurnakan Hasil Evaluasi

[Files\\hasil abstraksi wawancara\\HASIL WAWANCARA INTERVIEWEE 1](#)

1 reference coded, 2.16% coverage

Reference 1: 2.16% coverage

Setelah ada evaluasi tentunya di perbaiki ya mbak yang jadi evaluasinya nah itu ada Namanya penyempurnaan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD tadi sesuai dengan hasil evaluasi yang ditetapkan bersama dengan keputusan Pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Perda tentang perubahan APBD tadi

17. Tema 2 = Tahap Proses
Subtema 2 = Penyusunan Anggarann
Kategori 9 = Penetapan APBD

[Files\\hasil abstraksi wawancara\\HASIL WAWANCARA INTERVIEWEE 1](#)

1 reference coded, 1.25% coverage

Reference 1: 1.25% coverage

Setelah itu disampaikan keputusan Pimpinan DPRDnya ke Menteri Dalam Negeri/Gubernur terus ya kalau udah kan ya sudah jadi to, ditetapkan APBDnya, nah itu semua lewat SIPD mbak kalo sekarang, kalau dulu manual

18. Tema 3 = Tahap Implementasi
Subtema 1 = SIPD

[Files\\hasil abstraksi wawancara\\HASIL WAWANCARA INTERVIEWEE 2](#)

2 references coded, 12.83% coverage

Reference 1: 6.15% coverage

kalau perubahan sebenarnya ndak ada perubahan caranya ya, karena kan memang caranya sama hanya untuk menyikapi pandemic ini memang sudah ada aturan tersendiri nantinya pemerintah tu harus apa, jadi kalau caranya sama aja kayak sebelumnya, hanya bedanya mungkin kalau sekarang pakai sistem ya namanya SIPD, kalau dulu sebelum covid kan ndak ada. Jadi kalau pandemic gini di peraturan itu sudah diinstruksikan, kalau terjadi kejadian ee luar biasa apa aja yang harus dilakukan, seperti melakukan pergeseran apbd tadi, terus realokasi, pemusatan anggaran berapa persennya dan lain lain itu, jadi memang prosedurnya itu ndak berubah.

Reference 2: 6.68% coverage

jadi kalau yang tadi tentang implementasinya ya cuma sekarang kami dalam nyusun anggaran ini pake namanya SIPD tadi mbak, jadi disitu bedanya hanya yang dulu penyusunan, perubahan, pergeseran dll itu dilakukan manual, sekarang dikembangkan lagi mbak pakai sistem, tapi mekanismenya sama ya hanya saja ee.. karna sekarang covid dan kemajuan teknologi sudah pesat jadi sebagai pemerintah kasarane juga ndak mau kalah kan ya, makanya untuk meminimalisir tatap muka dan juga mengembangkan sistem dibuat lah sistem yang namanya SIPD. disitu nanti semua kerjanya by sistem, jadi misal kaya penyusuna KUA PPAS nanti juga lewat sistem yang mana semua instruksi ada didalam permendagri ya mbak.

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang 50234
Telp. (024) 8441555, 8505003 (hunting) Fax. (024) 8415429 - 8445265
e-mail: unika@unika.ac.id http://www.unika.ac.id



27 Januari 2022

Nomor : 00326/B.3.3/FEB/1/2022
Lamp. : -
Hal : *Ijin Penelitian dan Pengambilan Data/Kuesioner*

Yth. Kepala
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang
Jl. Ahmad Yani No.55 Ungaran Timur
Kab. Semarang

Dengan hormat,

Dalam rangka mempersiapkan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata Semarang untuk memenuhi syarat kelulusan, maka mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan menyusun Tugas Akhir/ Skripsi.

Berkenaan dengan keperluan tersebut, maka kami mohon berkenan memberi bantuan serta kebijaksanaan ijin penelitian/pengambilan data/sebar kuesioner di instansi yang Bapak/Ibu pimpin, kepada mahasiswa kami di bawah ini :

N a m a : NILAM CAHYA PURWASKITA
N I M : 17.G1.0070
Tempat / tgl. Lahir : Klaten, 01 Februari 1999
Program Studi : Akuntansi
Alamat : Jl. Jaya Negara RT 09 RW 05, Ungaran Barat
Kab. Semarang
Telepon : 0812 5958 4452
Judul TA / Skripsi :

IMPLEMENTASI ANGGARAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG DI MASA PANDEMI COVID-19 DENGAN TINJAUAN ACTOR NETWORK THEORY.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik disampaikan terima kasih.



DR. THEODORUS SUDIMIN, MS
NPP : 058.1.1990.074

PAPER NAME

17.G1.0070.docx

WORD COUNT

17199 Words

CHARACTER COUNT

114046 Characters

PAGE COUNT

89 Pages

FILE SIZE

298.0KB

SUBMISSION DATE

Apr 7, 2022 10:40 AM GMT+7

REPORT DATE

Apr 7, 2022 10:43 AM GMT+7

● **19% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 18% Internet database
 - Crossref database
 - 5% Submitted Works database
 - 4% Publications database
 - Crossref Posted Content database
- **Excluded from Similarity Report**
- Bibliographic material
 - Cited material
 - Manually excluded text blocks
 - Quoted material
 - Small Matches (Less than 10 words)